



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2020

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116

Telp. (031) 3095361

Email : dinsos@bangkalankab.go.id

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah serta Penutup yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis ,Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Bab Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2020, untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan,

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN**WIBAGIO SUHARTA, S.Sos.MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730126 199302 1001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	10
3.1. Program dan Kegiatan	
BAB IV PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kinerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan). RKA Perubahan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD dan Renstra yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja 2020 Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahab Kedua Atas Peraturan Mengeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- g. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E);
- l. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E);
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 25/E);
- n. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 41 tahun 2016 kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2020 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja 2020 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 serta evaluasi kinerja di tahun 2020 dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang.

2. Memberikan arah pembangunan urusan Sosial di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun kedepan.
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Sosial dan Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA 2019-2023 dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) 2020 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Dinas Sosial
Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program/Kegiatan pada akhir periode renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan (output) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2020 Semester I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1.06	Urusan Sosial									
1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansia bermasalah sosial yang terlayani	3,1	2,6 %	2,6 %	0,87 %	33,46	2,7 %	6 %	2,0
1.06.01.16.14	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia	Jumlah anak terlantar dan lansia yang terlayani dan di rehab	320	58 orang	55 orang	0 orang	0,00	61 orang	119 orang	0,4
1.06.01.16.15	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Jumlah tuna sosial dilayani dan direhabilitasi	635	11 orang 5	11 orang 5	46 orang	40,00	121 orang	282 orang	0,4
1.06.01.16.16	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Jumlah disabilitas yang terlayani dan direhabilitasi	199	36 orang	25 orang	0 orang	0,00	38 orang	74 orang	0,4

1.06.01.23	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0,6	0,5 %	0,5 %	0 %	0,48	0,6 %	1 %	2,0
1.06.01.23.01	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang dibina	663	120 orang	60 orang	0 orang	0,00	126 orang	246 orang	0,4
		Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3.481	630 orang	630 orang	630 orang	100,00	662 orang	1.922 orang	0,6
		Dokumen penerima rastra	5	1 dok	1 dok	1 dok	100,00	1 dok	3 dok	0,6
1.06.01.23.02	Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah sarana yang dipelihara	5	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100,00	1 lokasi	3 lokasi	0,6
		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100,00	2 keg	6 keg	#VALUE!
1.06.01.23.03	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber daya sosial	Jumlah lembaga yang dibantu	28	0 yayasan	5 yayasan	0 yayasan	0,00	5 yayasan	5 yayasan	0,2
		Jumlah TKSK yang terbina	90	18 orang	18 orang	18 orang	100,00	18 orang	54 orang	0,6
1.06.01.23.04	Pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan	peserta sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan	216	0 orang	0 orang	0 orang	0,00	50 orang	50 orang	0,2
1.06.01.24	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100	100 %	100 %	53,54 %	100	100 %	254 %	2,5
1.06.01.24.01	Perlindungan sosial korban bencana alam	persentase korban bencana alam yang dibantu	100%	6 %	100 %	50 %	50,00	100 %	156 %	156,0
		Jumlah daerah rawan bencana kekeringan yang dibantu	445	38 desa	89 desa	60 desa	67,42	89 desa	187 desa	0,4

1.06.01.24.02	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen penerima KPM	5	1 dok	1 dok	1 dok	100,00	1 dok	3 dok	0,6
		Data kemiskinan	5	1 dok	1 dok	1 dok	100,00	1 dok	3 dok	0,6
1.06.01.24.03	Perlindungan sosial korban bencana sosial	% korban bencana sosial yang dibantu	100%	0 %	100 %	100 %	100,00	100 %	101 %	101,0
1.06.01.25	Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	6	6 %	6 %	%	0	6 %	12 %	2,0
1.06.01.25.01	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah LKS yang dibantu	28	5 lembaga	5 lembaga	lembaga	0,00	5 lembaga	10 lembaga	0,4
1.06.01.25.02	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	Jumlah PSM yang telah dibina	277	100 org	80 org	80 org	100,00	53 org	233 org	0,8
1.06.01.25.03	Pengembangan Kerja sama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang dibina	110	20 org	50 org	50 org	100,00	21 org	91 org	0,8
00.00.16	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	100	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,0
0.00.16.01	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	35	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7	7 jenis	21 jenis	0,6
		Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	45	9 jenis	9 jenis	9 jenis	100	9 jenis	27 jenis	0,6
0.00.16.02	Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	155	25 kali	41 kali	kali	0	25 kali	50 kali	0,3

		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	380	60 kali	60 kali	kali	0	80 kali	140 kali	0,4
0.00.16.03	Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	64	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	14 dokumen	16 dokumen	0,3
0.00.16.04	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	20	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100	3 jenis	19 jenis	1,0
		Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara	5	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3 unit	0,6
0.00.16.05	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	5	2 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	700	2 Jenis	11 Jenis	2,2
		Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	2	4 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	4 unit	2,0
0.00.16.06	Peningkatan disiplin pegawai	Jumlah pakaian aparatur dan kelengkapan yang diadakan	400	0 buah	0 buah	0 buah	0	100 buah	100 buah	0,3
0.00.16.07	Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar	40	5 orang	0 orang	0 orang	0	7 orang	12 orang	0,3
0.00.16.08	Penyusunan perencanaan dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	14	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	3 dokumen	6 dokumen	0,4
		Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA)	20	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	4 dokumen	8 dokumen	0,4
0.00.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PD	Jumlah laporan triwulan & semesteran monev PD yang tersusun (Renja/RKPD, APBD)	46	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100	8 laporan	20 laporan	0,4
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	5	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	0,6
0.00.16.10	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester/prognosis/akhir tahun	2	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	0 dokumen	3 dokumen	1,5

		Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran	264	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0	66 laporan	66 laporan	0,3
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	4	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	2 dokumen	0,5
0.00.16.11	Fasilitasi peringatan hari jadi kabupaten/Provinsi	Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi	9	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	2 kegiatan	4 kegiatan	0,4

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk Mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas daerah yang melaksanakan pembangunan di bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas.

3.1. Program dan Kegiatan Dinas Sosial tahun 2020 :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

TUJUAN				SASARAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		2020	Perubahan			2020	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya PMKS dalam rangka kontribusi pada penurunan angka kemiskinan	Jumlah PMKS	567.205		Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	7,81	6,0	

Tabel 3.2
Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Sosial
Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Renja Awal				Perubahan Renja Tahun 2020				Selisih	Catatan Penting (Alasan Perubahan)
			Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Lokasi	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6-10	13
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
1.06	Urusan Sosial											
1.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansia bermasalah sosial yang terlayani	Bkl	2,7	411.486.250	APBD	Bkl	0,2	24.924.800	APBD	386.561.450	
1.06.01.16.14	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia	Jumlah anak terlantar dan lansia yang terlayani dan di rehab	Bkl	61 org	154.105.000	APBD	Bkl	3.634 Orang	750.000.000	DID	-595.895.000	Jaring Pengaman Sosial
1.06.01.16.15	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Jumlah tuna sosial yang dilayani dan direhabilitasi	Bkl	121 org	166.500.000	APBD	Bkl	23 orang	24.924.800	APBD	141.575.200	Untuk percepatan penanganan covid-19
1.06.01.16.16	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Jumlah disabilitas yang dilayani dan direhab	Bkl	38 org	90.881.250	APBD	Bkl	0,00	0	APBD	90.881.250	Untuk percepatan penanganan covid-19

1.06.01.23.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Bkl	0,6	948.696.750	APBD	Bkl	0,6	1.461.438.800	APBD	-512.742.050	
1.06.01.23.01	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang dibina	Bkl	126 org	159.731.250	APBD	Bkl	0	0	APBD	159.731.250	Percepatan penanganan covid-19 sebagai jaring pengaman sosial DID 2M
		Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Bkl	662 org	165.000.000	APBD	Bkl	9.793	2.430.440.000	APBD	-2.265.440.000	
		Dokumen penerima rastra	Bkl	1 dokumen	201.225.000	APBD	Bkl	1	131.385.500	APBD	69.839.500	
1.06.01.23.02	Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah sarana yang dipelihara	Bkl	1 lokasi	47.250.000	APBD	Bkl	1	35.000.000	APBD	12.250.000	Untuk percepatan penanganan covid-19
		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	Bkl	2 keg	83.740.500	APBD	Bkl	2	0	APBD	83.740.500	
1.06.01.23.03	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber daya sosial	Jumlah lembaga yang dibantu	Bkl	5 yayasan	66.150.000	APBD	Bkl	0	0	APBD	66.150.000	Untuk percepatan penanganan covid-19
		Jumlah TKSK yang terbina		18 orang	75.600.000	APBD		18	114.613.300	APBD	-39.013.300	
1.06.01.23.04	Pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Peserta sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan	Bkl	50 orang	150.000.000	APBD	Bkl	0	0	APBD	150.000.000	Untuk percepatan penanganan covid-19
1.06.01.24.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	Bkl	100	2.270.295.760	APBD	Bkl	100	322.440.300	APBD	1.947.855.460	
1.06.01.24.01	Perlindungan sosial korban bencana alam	persentase korban bencana alam yang dibantu	Bkl	100%	196.275.000	APBD	Bkl	100	107.381.700	APBD	88.893.300	Untuk percepatan penanganan covid-19
		Jumlah daerah rawan bencana kekeringan yang dibantu	Bkl	89 desa	86.950.000	APBD	Bkl	89	49.210.400	APBD	37.739.600	

1.06.01.24.02	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen penerima KPM	Bkl	1 dokumen	157.680.250	APBD	Bkl	1	147.103.200	APBD	10.577.050	Untuk percepatan penanganan covid-19
		Jumlah penerima JKN	Bkl	479.000 org	251.105.000	APBD	Bkl	0		APBD	251.105.000	
		Data kemiskinan	Bkl	1 dokumen	1.540.785.510	APBD	Bkl	1		APBD	1.540.785.510	
1.06.01.24.03	Perlindungan sosial korban bencana sosial	% korban bencana sosial yang dibantu	Bkl	100	37.500.000	APBD	Bkl	100	18.745.000	APBD	18.755.000	Untuk percepatan penanganan covid-19
1.06.01.25.	Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Bkl	6	159.437.500	APBD	Bkl	0	0	APBD	159.437.500	
1.06.01.25.01.	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah LKS yang dibantu	Bkl	5 Lembaga	60.156.250	APBD	Bkl	0	0	APBD	60.156.250	Untuk percepatan penanganan covid-19
1.06.01.25.02.	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	Jumlah PSM yang dibina	Bkl	53 org	62.281.250	APBD	Bkl	0	0	APBD	62.281.250	Untuk percepatan penanganan covid-19
1.06.01.25.03.	Pengembangan Kerja sama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang dibina	Bkl	21 org	37.000.000	APBD	Bkl	0	0	APBD	37.000.000	Untuk percepatan penanganan covid-19
	Urusan Umum											
00.00.16	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Dinsos	100	2.029.489.240	APBD	Dinsos	100	1.557.444.639	APBD	472.044.601	

0.00.16.01.	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	Bkl	7 jenis	236.095.180	APBD	Bkl	7	100.000.000	APBD	136.095.180	Untuk percepatan penanganan covid-19
		Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	Bkl	9 jenis	1.239.790.000	APBD	Bkl	9	1.105.145.471	APBD	134.644.529	
0.00.16.02.	Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	Bkl	25 kali	15.000.000	APBD	Bkl	0	0	APBD	15.000.000	Untuk percepatan penanganan covid-19
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan		80 kali	135.000.000	APBD		80	63.019.370	APBD	71.980.630	
0.00.16.03.	Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	Dinsos	14 dok	5.000.000	APBD	Dinsos	14	1.956.700	APBD	3.043.300	Untuk percepatan penanganan covid-19
0.00.16.04.	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	Dinsos	3 jenis	102.219.560	APBD	Dinsos	3	107.195.100	APBD	-4.975.540	Untuk percepatan penanganan covid-19
		Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara		1 unit	25.000.000	APBD		1	0	APBD	25.000.000	
0.00.16.05.	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	Dinsos	2 jenis	124.107.375	APBD	Dinsos	2	120.528.798	APBD	3.578.577	Untuk percepatan penanganan covid-19
		Jumlah prasarana aparatur yang diadakan		0 unit		APBD		0	0	APBD	0	
0.00.16.06.	Peningkatan Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian aparatur yang diadakan	Dinsos	100 buah	43.217.125	APBD	Dinsos	100	23.447.500	APBD	19.769.625	Untuk percepatan penanganan covid-19
0.00.16.07.	Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar		7 org	35.000.000	APBD		0	0	APBD	35.000.000	Untuk percepatan penanganan covid-19
0.00.16.08.	Penyusunan perencanaan dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Dinsos	3 dok	25.000.000	APBD	Dinsos	3	14.539.900	APBD	10.460.100	Untuk percepatan penanganan covid-19

		Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA)		4 dok	3.750.000	APBD		4	3.750.000	APBD	0	
		Jumlah data dan informasi PD	Dinsos	3 data	5.000.000	APBD	Dinso s	3	5.000.000	APBD	0	
0.00.16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PD	Jumlah laporan triwulan & semesteran monev PD yang tersusun (Renja/RKPD, APBD)	Bkl	8 laporan	3.280.000	APBD	Dinso s	8	3.280.000	APBD	0	Untuk percepatan penanganan covid-19
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun		1 laporan	5.000.000	APBD	Dinso s	1	2.141.800	APBD	2.858.200	
0.00.16.10.	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dinsos	1 dokumen	5.796.000	APBD	Dinso s	1	4.536.000	APBD	1.260.000	Untuk percepatan penanganan covid-19
		Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteran		66 laporan	2.484.000	APBD	Dinso s	66	2.904.000	APBD	-420.000	
0.00.16.11.	Fasilitasi peringatan hari jadi kabupaten/Provinsi	Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi	Bangkalan	2 keg	18.750.000	APBD	Bang kalan	0	0	APBD	18.750.000	Untuk percepatan penanganan covid-19

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2018 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Bangkalan, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena eskalasi permasalahan sosial yang terus berkembang maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan, maka pada tahun 2020 lebih difokuskan pada program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- b. Program Pemberdayaan Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Prioritas tersebut di atas penting untuk mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020, karena terkait dengan hal tersebut akan menimbulkan implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa penanganan dan pelayanan sosial terhadap PMKS sesungguhnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan,

penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karenanya peningkatan penyediaan alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan menjadi sangat strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

2. Program-program penanganan PMKS pada hakekatnya merupakan upaya untuk mencegah berkembang dan mengurangi populasi PMKS sekaligus menekan eksekusi yang ditimbulkan. Oleh karenanya Program tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, terpadu dan didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.
3. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bencana alam, bencana sosial maupun bencana teknologi perlu disiapkan sebuah sistem pengelolaan pencegahan dan penanganan bencana secara terpadu. Oleh karenanya sistem pencegahan ini melalui pengembangan manajemen pengelolaan bencana berbasis masyarakat yang salah satunya adalah pembinaan terhadap TAGANA (Taruna Siaga Bencana), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan bencana harus dilakukan.
4. Dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan yang profesional dan manusiawi dibutuhkan dukungan sarana dan prasana yang memadai.

Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan sosial di atas hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa penyediaan pelayanan harus merespon perubahan paradigma dan trend permasalahan sosial yang berkembang. Oleh karena itu diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada pembangunan yang berbasis masyarakat (*community base*).
2. Peningkatan kualitas aparatur dalam penyiapan pelayanan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan, korban trafficking, korban penelantaran dan eksploitasi serta kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Lampiran

Tabel Program Kegiatan berdasarkan APBD 2020 (DPA PD Th. 2020)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	APBD 2020 (DPA PD Th. 2020)			
			Lokas i	Target Kinerja	Anggaran	Sumb er Dana
1	2	3	4	5	6	7
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1.06	Urusan Sosial					
1.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansia bermasalah sosial yang terlayani	Bkl	2,7	411.486.250	APBD
1.06.01.16.14	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia	Jumlah anak terlantar dan lansia yang terlayani dan di rehab	Bkl	61 org	154.105.000	APBD
1.06.01.16.15	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Jumlah tuna sosial yang dilayani dan direhabilitasi	Bkl	121 org	166.500.000	APBD
1.06.01.16.16	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Jumlah disabilitas yang dilayani dan direhab	Bkl	38 org	90.881.250	APBD
1.06.01.23.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Bkl	0,6	948.696.750	APBD
1.06.01.23.01	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang dibina	Bkl	126 org	159.731.250	APBD
		Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Bkl	662 org	165.000.000	APBD
		Dokumen penerima rastra	Bkl	1 dokumen	201.225.000	APBD

1.06.01.23.02	Kepahlawaan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah sarana yang dipelihara	Bkl	1 lokasi	47.250.000	APBD
		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional		2 keg	83.740.500	APBD
1.06.01.23.03	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber daya sosial	Jumlah lembaga yang dibantu	Bkl	5 yayasan	66.150.000	APBD
		Jumlah TKSK yang terbina		18 orang	75.600.000	APBD
1.06.01.23.04	Pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Peserta sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan	Bkl	50 orang	150.000.000	APBD
1.06.01.24.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	Bkl	100	2.270.295.760	APBD
1.06.01.24.01	Perlindungan sosial korban bencana alam	persentase korban bencana alam yang dibantu	Bkl	100%	196.275.000	APBD
		Jumlah daerah rawan bencana kekeringan yang dibantu	Bkl	89 desa	86.950.000	APBD
1.06.01.24.02	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen penerima KPM	Bkl	1 dokumen	157.680.250	APBD
		Jumlah penerima JKN	Bkl	479.000 org	251.105.000	APBD
		Data kemiskinan	Bkl	1 dokumen	1.540.785.510	APBD
1.06.01.24.03	Perlindungan sosial korban bencana sosial	% korban bencana sosial yang dibantu	Bkl	100	37.500.000	APBD
1.06.01.25.	Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		6	159.437.500	
1.06.01.25.01.	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah LKS yang dibantu	Bkl	5 Lembaga	60.156.250	APBD

1.06.01.25.02.	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	Jumlah PSM yang dibina	Bkl	53 org	62.281.250	APBD
1.06.01.25.03.	Pengembangan Kerja sama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang dibina	Bkl	21 org	37.000.000	APBD
00.00.16	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Dinso s	100	2.029.489.240	APBD
0.00.16.01.	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	Bkl	7 jenis	236.095.180	APBD
		Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	Bkl	9 jenis	1.239.790.000	APBD
0.00.16.02.	Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	Bkl	25 kali	15.000.000	APBD
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan		80 kali	135.000.000	APBD
0.00.16.03.	Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	Dinso s	14 dok	5.000.000	APBD
0.00.16.04.	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	Dinso s	3 jenis	102.219.560	APBD
		Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara		1 unit	25.000.000	APBD
0.00.16.05.	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	Dinso s	2 jenis	124.107.375	APBD
		Jumlah prasarana aparatur yang diadakan		0 unit		APBD
0.00.16.06.	Peningkatan Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian aparatur yang diadakan	Dinso s	100 buah	43.217.125	APBD
0.00.16.07.	Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar		7 org	35.000.000	
0.00.16.08.	Penyusunan perencanaan dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Dinso s	3 dok	25.000.000	APBD
		Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA)		4 dok	3.750.000	

		Jumlah data dan informasi PD	Dinso s	3 dok	5.000.000	APBD
0.00.16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PD	Jumlah laporan triwulan & semesteran monev PD yang tersusun (Renja/RKPD, APBD)	Bkl	8 laporan	3.280.000	APBD
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun		1 laporan	5.000.000	APBD
0.00.16.10.	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1 dokumen	5.796.000	APBD
		Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteran		66 laporan	2.484.000	APBD
0.00.16.11.	Fasilitasi peringatan hari jadi kabupaten/Provinsi	Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi		2 keg	18.750.000	APBD